

TESIS

PEMERIKSAAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU DI MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PUTUSAN BAWASLU TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU



Diajukan Oleh

AKHMAD ZAINI

NIM: 2420215310118

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
Juni 2026**

**JUDUL : PEMERIKSAAN PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU DI
MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PUTUSAN BAWASLU
TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**
: AKHMAD ZAINI
NIM : 2420215310118

**Disetujui
Komisi Pembimbing,**

Pembimbing



**Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
NIP. 19600418198603 1 002**

Diketahui,

**Koordinator
Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaifi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AKHMAD ZAINI, S.H.

NIM : 2420215310118

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka dan bebas plagiatisme

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.



Banjarmasin, 8 Juni 2026
Yang membuat pernyataan,

AKHMAD ZAINI, S.H
NIM. 2420215310118

**PEMERIKSAAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU DI MAHKAMAH
KONSTITUSI BERDASARKAN PUTUSAN BAWASLU TENTANG
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Akhmad Zaini¹, H. Hadin Muhjad²

Magister Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 113 halaman

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah Pemeriksaan Perselisihan Tentang Hasil Pemilu Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusan Bawaslu Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Tujuan dan kegunaan penelitian ini untuk mengkaji tentang Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil Pemilu tanpa ada putusan sengketa proses Pemilu dan Menganalisis kedudukan putusan mahkamah konstitusi tentang perselisihan hasil pemilu yang berasal dari sengketa proses pemilu.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang bersifat perspektif guna mendapatkan jawaban rumusan masalah. Rumusan masalah pertama membahas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil Pemilu tanpa ada putusan sengketa proses Pemilu. Rumusan masalah kedua membahas kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil pemilu yang berasal dari sengketa proses pemilu.

Adapun hasil penelitian adalah : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil Pemilu tanpa ada putusan sengketa proses Pemilu adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sejatinya memiliki peran strategis dalam menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia terutama sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawal konstitusi negara. Berdiri di tengah sistem politik yang dinamis, MK tidak hanya berperan sebagai pengadilan dalam sengketa ketatanegaraan, tetapi juga sebagai institusi yang berkomitmen untuk melindungi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Sejak berdirinya, MK telah memantapkan dirinya sebagai lembaga negara yang berperan sebagai pengawal demokrasi dan penjaga konstitusi, atau dikenal sebagai *the guardian of democracy* dan *the guard of constitution*. MK menegakkan peradilan yang adil dengan fokus pada keadilan substantif, menghasilkan putusan objektif dan berintegritas yang diterima semua pihak. Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap peran MK sebagai penegak prinsip demokrasi dan konstitusi. 2. Kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil pemilu yang berasal dari sengketa proses Pemilu, bahwa dalam setiap pilpres atau pilleg, pihak yang kalah selalu menganggap sebagai pihak yang dicurangi dan meminta penyelesaian melalui

PHPU di Mahkamah Konstitusi. Melalui saluran hukum ini pihak kalah mengharapkan adanya penyelesaian yang adil. Untuk itu dibuktikan dengan alat bukti adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang menang. Dalam PMK 3/2023 atau PMK 4/2023 menentukan bahwa PHPU menyangkut selisih angka yang disebabkan kesalahan perhitungan suara. Sudah tentu kesalahan perhitungan suara itu terjadi pada saat proses pemilu, sehingga UU sudah menugaskan Bawaslu dalam penanganan sengketa proses, maka MK harus menolak jika ternyata tidak terdapat dalam permohonan PHPU adanya sengketa proses pemilu. Sehingga sengketa proses dengan sengketa hasil pemilu terjadi integrasi.

EXAMINATION OF ELECTION RESULT DISPUTES IN THE CONSTITUTIONAL COURT BASED ON THE BAWASLU DECISION ON ELECTION PROCESS DISPUTE RESOLUTION

Akhmad Zaini¹, H. Hadin Muhjad²

Master of Law, Lambung Mangkurat University, 113 pages

ABSTRACT

The title of this research is "Examination of Election Result Disputes in the Constitutional Court Based on the Bawaslu Decision on Election Process Dispute Resolution." The purpose and purpose of this research is to examine Constitutional Court decisions on election result disputes without a decision on election process disputes and to analyze the position of Constitutional Court decisions on election result disputes originating from election process disputes.

The research method used is normative law with a perspective to obtain answers to the research questions. The first research question discusses Constitutional Court decisions on election result disputes without a decision on election process disputes. The second problem formulation discusses the position of the Constitutional Court's decision regarding election result disputes originating from election process disputes.

The research results are: 1. The Constitutional Court's decision in the election result dispute without any decision on the election process dispute is that the Constitutional Court of the Republic of Indonesia actually has a strategic role in maintaining and strengthening democracy in Indonesia, especially as an institution that functions to guard the country's constitution. Standing in the midst of a dynamic political system, the Constitutional Court not only plays a role as a court in state administration disputes, but also as an institution committed to protecting the principles of democracy and human rights guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Since its establishment, the Constitutional Court has established itself as a state institution that plays a role as a guardian of democracy and the guardian of the constitution, or known as the guardian of democracy and the guardian of the constitution. The Constitutional Court upholds fair trials with a focus on substantive justice, producing objective and integrity decisions that are accepted by all parties. This strengthens public trust in the role of the Constitutional Court as an enforcer of democratic and constitutional principles. 2. The position of the Constitutional Court's decision on election result disputes originating from election process disputes, that in every presidential or

legislative election, the losing party always considers itself to be the party that was cheated and requests a resolution through PHPU at the Constitutional Court. Through this legal channel, the losing party hopes for a fair resolution. This requires evidence of alleged fraud by the winning party. PMK 3/2023 or PMK 4/2023 stipulates that the PHPU (Election Dispute Resolution) concerns discrepancies caused by vote counting errors. Naturally, these vote counting errors occurred during the election process, and the law mandates the Election Supervisory Agency (Bawaslu) to handle process disputes. Therefore, the Constitutional Court must reject the PHPU if the PHPU petition does not address the election process dispute. This allows the process dispute and the election results dispute to be integrated.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kasih, anugerah, dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, yang berjudul: PEMERIKSAAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU DI MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PUTUSAN BAWASLU TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU, sebagai tugas akhir, dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati, terhatur segala penghargaan dan rasa terimakasih yang sangat tulus terhadap berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama ini :

1. Bapak Dr. Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Prof. Dr. H. Hadin Muhjad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing, dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian tesis ini;
4. Bapak Dr. Deden Koswara, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan masukan, saran, dan koreksi atas penulisan tesis ini;
5. Ibu Dr. Lies Ariyani, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan, saran, dan koreksi akan penulisan tesis ini;
6. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
7. Segenap Staff Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

8. Orangtua terkasih, segenap keluarga tercinta, rekan-rekan yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan semangat yang tiada henti hingga dapat menyelesaikan studi ini.

Banjarmasin, Juni 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AZ' or similar, written in a cursive style.

Akhmad Zaini, S.H.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
a. Tujuan Penelitian	12
b. Kegunaan Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	13
1. Kerangka Konseptual	13
a. Badan Pengawas Pemilu.....	13
b. Penyelesaian Semngketa-Sengketa Pemilu.....	14
c. Penanganan Sengketa Pemilu.....	15
d. Pengertian dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	15
e. Pemilihan Umum.....	17

2. Kerangka Teoritik	19
f. Teori Pemilihan Umum	19
g. Teori Sistem Pemilihan Umum.....	22
F. Metode Penelitian	25
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	28
 BAB II PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILU TANPA ADA PUTUSAN SENGKETA PROSES PEMILU	31
A. Jenis Penyelesaian Sengketa Pemilu.....	31
B. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu	39
C. MK dalam penyelesaian hasil Pemilu tanpa putusan sengketa Proses	44
 BAB III KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILU YANG BERASAL DARI SENGKETA PROSES PEMILU.....	67
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilu	67
B. Perselisihan Hasil Pemilu Yang Berasal Dari Sengketa Proses Pemilu Pada Bawaslu	83
C. Implikasi hukum putusan MK dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu yang didahului sengketa proses Pemilu.....	105
 BAB IV PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
 DAFTAR PUSTAKA	